## **ABSTRAK**

**Diartha Vellayati. 2013.** "Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam 1999-2017" *Skripsi.* Padang: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Skripsi ini mengkaji tentang dualisme kebijakan dari dua lembaga pemerintah yaitu Pemerintah Kota Batam dan BP Batam sejak tahun 1999-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, menganalisis kerugian dan keuntungan sejak terjadinya dualisme serta solusi yang harus dilakukan dengan adanya dualisme tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif dan melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah heuristik yaitu pengumpulan data baik tertulis maupun lisan. Pengumpulan ini berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang terkumpul kemudian di kritik untuk mengetahui keaslian isi informasi. Selanjutnya data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan objek yang diteliti. Kemudian hasil penelitian tersebut ditulis secara sistematis dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, kewenangan Pemerintah Kota Batam yaitu menjalankan pemerintahan di luar yang bersifat khusus dan BP Batam menjalankan pemerintahan bersifat khusus bagi kepentingan nasional dengan status sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan menyertakan pemerintah daerah. *Kedua*, kerugiannya yaitu, tidak ada kepastian hukum, terpuruknya investasi, anjloknya pertumbuhan ekonomi, melonjaknya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pengangguran, menurunnya daya saing Batam dan perbedaan dalam pelayanan perizinan, sedangkan keuntungannya karena Batam telah ditetapkan sebagai kawasan khusus yaitu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dan sektor pariwisata sebagai alternatif.

Kata kunci: Kebijakan, kewenangan, otonomi daerah, Pemerintah daerah, Badan Pengusahaan (BP).